

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Definisi pajak telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama di pasal 1 ayat 1. Dalam ketentuan ini, pajak dipahami sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu atau entitas kepada Negara dengan ikatan hukum, tanpa adanya timbal balik yang langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan Negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Darussalam et al., 2024)

Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan yang signifikan dan esensial bagi suatu negara. Peran pajak terletak pada penyediaan dana untuk melaksanakan peran negara dalam menghadapi isu-isu sosial, mengoptimalkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta membangun hubungan sosial yang lebih erat antara warga dan pemerintah. Terdapat dua kategori utama pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Sebagai sumber pendapatan yang strategis, pajak daerah bersama retribusi daerah berfungsi untuk menopang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, demi tercapainya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, serta akuntabel. (FH Wahdah, 2024)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebagai salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan kepada perorangan maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pengelolaan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui sistem SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), termasuk di Kota Pekalongan, yang bertugas memberikan pelayanan serta mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (Rahayu dan Santos, 2018)

Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan kontribusi dari Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sangat esensial untuk membiayai negara serta pengembangan nasional. Keberhasilan dalam proses pemungutan dan penerimaan pajak tidak hanya diukur dari pencapaian target nominal, namun juga dari cara pelaksanaan, kemudahan dalam pelayanan, ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran, serta strategi yang digunakan untuk menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, efektivitas pemungutan pajak dapat dievaluasi melalui perbandingan antara potensi penerimaan pajak yang tersedia dengan realisasi yang diperoleh, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Jika potensi pajak sangat besar tetapi penerimaan yang diperoleh tergolong rendah, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem pemungutan pajak, kurangnya sosialisasi yang memadai, atau terdapat hambatan lain yang perlu dianalisis lebih lanjut. (FW Setyawati, 2023)

Berbagai teori berfungsi sebagai dasar bagi negara dalam melaksanakan haknya untuk meminta pajak dari warga. Dengan demikian, secara teoritis, efektivitas pemungutan pajak oleh negara berpotensi untuk dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun dalam kajian akademis (Prakoso, Kesit Bambang, 2005). Salah satu teori yang ada adalah Teori Pendekatan Manfaat, yang menyatakan bahwa pajak ditetapkan berdasarkan manfaat yang diterima oleh setiap individu, sehingga sering disebut sebagai teori kepentingan. Di samping itu, terdapat teori pendekatan kemampuan membayar, yang menekankan bahwa beban pajak harus sesuai dengan kapasitas setiap individu dalam memikulnya, yang dapat diukur melalui pendapatan, kekayaan, atau pengeluaran. Teori ini dikenal sebagai teori daya pilar. Selanjutnya, ada teori pengabdian yang menganggap pajak sebagai kewajiban penting dan bentuk pengabdian individu terhadap negaranya.

Terakhir, teori asas daya beli menekankan bahwa dasar pemungutan pajak harus memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau negara.

Keadilan kerap kali dipahami sebagai hasil dari proses pemungutan pajak. Salah satu teori yang ada adalah teori asuransi, di mana pajak dianggap sebagai semacam premi yang dibayarkan warga kepada negara sebagai penanggung risiko. Namun, teori ini menghadapi beberapa tantangan, karena jika masyarakat menderita kerugian, seharusnya negara memberikan kompensasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, hal ini tidak terjadi. Selain itu, tidak terdapat hubungan yang jelas antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan layanan yang diterima oleh masyarakat. (Ratnasari, 2025: 83-84).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengumpulan pajak ini dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (UPT Bapenda). Salah satu metode pengumpulan yang diterapkan adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersedia di berbagai lokasi, termasuk di Kota Pekalongan. Prosedur pemungutan pelaksanaan Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui kerja sama tiga instansi pemerintah, yakni Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT. Persero Asuransi Jasa Raharja. Mekanisme pencatatan serta pembayaran pajak tersebut diselenggarakan melalui sistem SAMSAT, yang mencakup pengelolaan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran pajak, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), serta SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Semua rangkaian prosedur ini dilaksanakan di SAMSAT untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. (Rini Wulandari, 2020)

Kota Pekalongan memberikan pilihan untuk membayar pajak kendaraan, seperti di kantor Samsat Pekalongan UPPD Jawa Tengah, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Sehingga membuat lebih mudah bagi orang-orang untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah. Samsat Pekalongan masih memakai cara tradisional. Ini berarti orang-orang harus pergi ke kantor Samsat, dan mereka perlu antri di loket-loket yang ada, yaitu dua loket untuk pendaftaran dan verifikasi, serta loket untuk membayar dan mengambil tanda terima. Samsat Drive Thru merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa harus keluar dari kendaraan. Pemilik kendaraan hanya perlu membawa dokumen asli seperti STNK dan KTP tanpa perlu membuat salinan. Setelah proses pendaftaran selesai, mereka dapat langsung menuju loket berikutnya untuk melakukan pembayaran dan menerima STNK baru beserta tanda terima. (Santoso, B & Wulandari, 2020)

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, seharusnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari SAMSAT Kota Pekalongan, jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami pertumbuhan setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat sebanyak ±270.000 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak ±256.000 unit, namun peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diiringi dengan peningkatan yang seimbang dalam hal penerimaan pajaknya. Selain itu, kemudahan akses layanan pembayaran pajak juga memegang peranan penting. Di era digital, berbagai inovasi seperti e-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Corner, hingga kerjasama dengan lembaga keuangan dan marketplace telah dihadirkan untuk memudahkan wajib pajak. Namun demikian, belum semua inovasi ini digunakan secara optimal oleh masyarakat Kota Pekalongan, yang sebagian besar masih lebih nyaman melakukan pembayaran secara langsung di kantor Samsat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut. Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata pemungutan PKB sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Pekalongan?
2. Sejauh mana pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh melalui SAMSAT Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Pekalongan?
4. Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah diambil oleh SAMSAT Kota Pekalongan Sebagai upaya untuk mendorong kedisiplinan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan hasil penerimaan

1.3.Tujuan Tugas Akhir

Fokus utama dari penelitian ini untuk :

1. Bagaimanakah efektivitas proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT Kota Pekalongan?
2. Mengetahui Apakah jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanding dengan realisasi penerimaan pajak?
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekalongan.

4. Mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak SAMSAT Kota Pekalongan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.4.Kegunaan Tugas Akhir

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta kontribusi positif bagi semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Pihak-pihak tersebut meliputi:

1. Bagi Penulis

Melalui penyusunan tugas akhir mampu memperluas pemahaman penulis mengenai efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta menambah referensi bagi penelitian sejenis di bidang perpajakan daerah dan manajemen keuangan publik.

2. Bagi Tenaga Pengajar

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga dapat membantu dalam pembayaran pajak bermotor.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan SAMSAT Kota Pekalongan.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah.

1.5. Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Fokus penelitian atau objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini merupakan Wajib Pajak (WP) yang ada di wilayah Pekalongan.

2. Lokasi Tugas Akhir

Lokasi penelitian ini berada di SAMSAT Kota Pekalongan, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 125, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.

3. Jenis Tugas Akhir

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang berfungsi untuk menggambarkan, mengkaji, menjelaskan, dan menyimpulkan fenomena yang diamati dengan dukungan data numerik.

4. Penentuan Variabel Tugas Akhir

Untuk memberikan arah dan fokus yang lebih jelas dalam penelitian ini. Penulis melakukan batasan-batasan penelitian dalam penulisan tugas akhir dengan judul ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT (SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP) KOTA PEKALONGAN. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel independen

a. Kuesioner

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab bersama narasumber, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur relevan guna memperoleh landasan teori dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai SAMSAT yang terlibat sebagai responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat oleh penulis dari sumber lain dan bukan informasi langsung dari objek penelitian. Seperti contohnya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari Kantor SAMSAT dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

1.6.Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Struktur awal tugas akhir mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian karya, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian utama terdiri dari lima bab, diantaranya

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penyusunan tugas akhir, kegunaan penelitian, metode yang diterapkan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian berikut adalah menguraikan konsep-konsep teoritis yang melandasi penulisan dalam tugas akhir ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai pemungutan pajak dan juga efektivitas nya.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) Kota Pekalongan, filosofi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta tugas, dan kedudukan dan fungsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang topik tugas akhir terkait. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT (SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP) KOTA PEKALONGAN Pembahasan ini berdasarkan pada teori, serta tinjauan data dan fakta

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penelitian yang merespons rumusan masalah, serta memberikan saran praktis bagi pihak terkait dan masukan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran. Daftar pustaka memuat semua referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan pada penulisan tugas akhir yang disusun berdasarkan urutan abjad nama pengarang/judul. Lampiran berisi hasil data yang bersifat melengkapi uraian pada bagian utama.

